



TRANSAKSI DIGITAL
4 OPD Terapkan
Retribusi Non-Tunai



Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad (dua kanan) dalam penerapan transaksi non-tunai di Ruang Bima, kompleks Balai Kota Jogja, Rabu (3/3).

GONDOKUSUMAN- Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jogja menerapkan transaksi non-tunai untuk pemasukan kas daerah maupun pengeluaran. Penerapan transaksi non-tunai tersebut bekerja sama dengan Bank BPD DIY melalui perjanjian kerja sama (PKS).

Ujang Hasanudin
ujang@harianjogja.com

Keempat OPD tersebut adalah penerimaan pembayaran persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pembayaran retribusi di Dinas Perhubungan, pembayaran pengelolaan limbah di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), serta pembayaran retribusi pasar di Dinas Perdagangan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan pembayaran non-tunai bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penerimaan daerah maupun pengeluaran kas daerah.

Menurut dia transaksi non-tunai sebenarnya sudah dimulai sejak 2017 di lingkungan Pemkot Jogja, dimulai dari pembayaran gaji pegawai, lalu ditingkatkan lagi melalui sejumlah retribusi di beberapa OPD.

Dalam transaksi non-tunai untuk beberapa retribusi di-

Transaksi non-tunai sudah dimulai sejak 2017 di lingkungan Pemkot Jogja.

Pembayaran non-tunai bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penerimaan daerah maupun pengeluaran kas daerah.

kerjasama dengan BPD mendigitalisasi semua layanan publik.

Digitalisasi Pembayaran
Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan BPD mendukung apa yang akan dilakukan Pemkot Jogja dalam hal memudahkan yang berkaitan dengan pengeluaran maupun pendapatan. "Pilihan digitalisasi jadi bagian terpenting apalagi di masa pandemi Covid-19

DLH
Dinas PUPKP
Dishub
Dinas Perdagangan
netral
biasa
untuk diketahui

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

dituntut untuk melakukan percepatan,” kata Santoso.

BPD DIY berkomitmen untuk menyesuaikan dengan regulasi Pemkot Jogja. Santoso menjamin keamanan sistem pembayaran non-tunai karena sudah mendapat izin dari Bank Indonesia dalam mengadopsi pembayaran melalui *mobile banking* dan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Dia berharap tidak hanya empat OPD menerapkan transaksi digital, namun semua OPD bisa menerapkan non-tunai.

Bukan hanya penerimaan tetapi pembayaran mitra di seluruh OPD juga. Bahkan sampai pengadaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat

juga bisa dilakukan sehingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga ikut terdata.

Uji Kir

Kepala Dinas Perhubungan Jogja, Agus Arif Nugroho mengatakan sebenarnya retribusi parkir dan retribusi uji kir kendaraan di intansinya sudah diterapkan pembayaran non-tunai sejak 2020. Tidak ada petugas di Dinas Perhubungan yang menerima uang tunai dari wajib uji kir maupun dari juru parkir.

“Semua retribusi dibayarkan melalui bank dan langsung masuk ke kas daerah, tidak ada lagi transaksi [langsung] masyarakat ke petugas,” ucap Agus.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas PUPKP 5. BPKAD 6. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005